

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Meskipun Indonesia belum bisa lepas dari jerat utang, namun Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan Indonesia merupakan negara penerima bantuan IDB terbesar bila dibandingkan dengan anggota yang lain. Bantuan IDB terbesar itu dilaksanakan bersamaan pada sidang tahunan ke-41 IDB di Jakarta. IDB memberikan pinjaman senilai US\$ 1,6 miliar atau setara Rp. 21,1 miliar kepada 14 negara anggotanya. Negara-negara yang menandatangani nota kesepahaman tersebut antara lain Indonesia, Bangladesh, Chad, Mesir, Gambia, Pakistan, Kamerun, Gabon, Burkina, dan Nigeria. Selain itu, Suriname, Maroko, Iran, Gambia, dan Kirgistan. Namun, separuh dari pinjaman tersebut yaitu sebanyak US\$ 824 juta atau setara Rp. 11,5 triliun diterima oleh Indonesia. Bantuan tersebut dalam bentuk kemitraan antar-anggota IDB yang tergabung di Member Country Partnership (MCPS) 2016-2020.

Sudah sejak lama, bahkan sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, Arab Saudi memberikan dukungan politik kepada Indonesia dan mendukung posisi Indonesia pada forum- forum internasional. Hubungan baik Indonesia - Arab Saudi terjalin semakin erat pada era Presiden Soekarno dengan Raja Faisal dan kini diteruskan oleh Presiden Joko Widodo.

Sebagaimana teori konstruktivis yang menyatakan bahwa kepentingan sebagai dasar tindakan atau perilaku politik merupakan produk dari identitas aktor-aktor, begitu pula sebaliknya bahwa aktor-aktor politik (agent) melaksanakan peran

penting dalam mewujudkan kepentingan yang didasarkan oleh identitas. Dalam kasus Islamic Development Bank, negara-negara dalam IDB tentu memiliki kepentingan yang didapat dari hasil identitas aktor dan diaplikasikan ke dalam perilakunya. Hal ini tidak terkecuali pada negara Arab Saudi sebagai pemimpin dari bank tersebut tentunya memiliki kepentingan-kepentingan yang menggunakan bank tersebut sebagai “kendaraannya”.

Dalam *Decision Making Process*, proses pengambilan keputusan dirumuskan oleh berbagai aktor, kelompok, dan pihak yang berkepentingan melalui proses tarik menarik, tawar menawar, saling mempengaruhi dan kompromi antar stake holders terkait. Keputusan yang ditetapkan merupakan proses resultan politik yang melewati deliberasi yang panjang dan kompleks. Negara-negara yang menjadi adikuasa merupakan Sembilan negara yang tegabung dalam Direktur Eksekutif yang merupakan pemegang saham terbesar yakni United Arab Emirates, Qatar, Libya, Saudi Arabia, Iran, Nigeria, Turki, Kuwait, dan Mesir. Terutama Negara Arab Saudi yang memiliki setengah dari hak suara. Tentu saja segala hasil dari keputusan berdasarkan pertimbangan dari kesembilan negara tersebut.

Keterlibatan Negara Arab Saudi yang memiliki setengah dari total hak suara dalam IDB tentunya memiliki kepentingan-kepentingan tersendiri dalam setiap keputusan yang diambilnya. Hal ini dapat saja terkait mengenai politik keagamaan. Arab Saudi yang cenderung memberikan bantuan-bantuan kepada negara-negara Sunni, termasuk kepada Negara Indonesia yang notabene Negara mayoritas Islam sunni.

Memenuhi dan mempertahankan perannya sebagai pemimpin dalam masyarakat Islam adalah prioritas kebijakan luar negeri untuk Arab Saudi dan menganggap dirinya sebagai kepala sekolah yang bertanggung jawab atas pengembangan, kerjasama, dan dukungan daerah . Arab Saudi mengambil inisiatif untuk menemukan dan menganggap sponsor utama beberapa Bank Daerah paling mungkin untuk mendapatkan kepemimpinan di wilayah Arab dan pinggirannya tanpa campur tangan negara-negara lain.

Maka dari itu, Arab Saudi menjalankan agenda politiknya di dunia Islam tanpa campur tangan negara-negara lain melalui IDB. Arab Saudi menciptakan satu set negara anggota yang beruntung dan kurang beruntung di dalam institusi tersebut. Kegiatan bantuan pembangunan di negara-negara berkembang yang menjadi sasaran bantuan IDB, di bawah kendali negara Arab Saudi.

Muslim terpisah dalam dua kelompok utama, Sunni dan Syiah. Di Timur Tengah agama menjadi sebuah persoalan serius. Arab Saudi adalah negara dimana terdapat dua tempat paling suci Islam, Mekkah dan Madinah, sehingga menyatakan diri sebagai 'pemimpin Sunni dunia'. Kepentingan Saudi di wilayah Arab dan pinggirannya sangat terkait dengan kepercayaan agama. Ini adalah konsekuensi yang dikaitkan dengan polarisasi masyarakat Islam berdasarkan afiliasi Islam di mana terdapat dukungan politik internasional. Perbedaan ideologi ini membuat Arab Saudi enggan untuk berunding dengan negara-negara berideologi Syiah dalam forum-forum Internasional.

Arab Saudi juga lebih menyukai populasi Sunni dalam hal kerjasama pembangunan. Mayoritas sumber daya IDB digunakan untuk pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan kaum muda mengikuti prinsip Salafi yang terkait dengan ajaran anti-Syiah.

IDB pun turut dalam mengembangkan arus keuangan berbasis syariah kepada bank-bank daerah negara anggotanya yang digunakan untuk memperkuat akses bilateral dan mempromosikan model pembiayaan perdagangan syariah, serta bertukar pandangan antar-pengusaha dari negara-negara anggota agar terciptanya kehidupan islam yang moderat.

Banyak pengamat yang menilai bahwasannya Negara Indonesia merupakan negara moderat. Islam moderat yang berkembang di Indonesia terbukti mampu membangun konstruksi antaragama dalam perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan adanya perdamaian, merupakan modal untuk membangun peradaban. Arab Saudi pun melihat Indonesia sebagai negara muslim terbesar sehingga bisa menjadi partner yang potensial untuk mengembangkan kerjasama di segala hal, termasuk di bidang energi, bidang pendidikan dan sebagainya.

Dengan bermodal Indonesia yang telah memiliki bargaining positions dalam IDB yang dilatar belakangi oleh beberapa faktor, salah satunya Indonesia selalu aktif berperan dalam aktivitas IDB, baik dalam hal memberikan dukungan moral, dukungan finansial, maupun yang berkaitan dengan peningkatan sumber

daya manusia, membuat Indonesia memiliki kepentingan agar IDB dapat berkontribusi lebih banyak untuk pembangunan.

Perpolitikan Indonesia dalam IDB juga terlihat ketika Indonesia menjadi salah satu negara pendiri IDB. Hal ini membuat Indonesia tergabung dalam *Board Executive Director* (BED), dan turut membangun *Country Gateway Office* (CGO) di Indonesia.

Pada saat menjadi tuan rumah sidang IDB ke 41, Indonesia juga berkesempatan memilih tema apa yang akan diangkat. Dikarenakan pemerintahan Indonesia pada saat ini sedang gencar dalam melakukan pembangunan infrastruktur, maka tema yang diangkat dalam sidang adalah mengenai “pembangunan infrastruktur”. Salah satu faktor diatas itu lah yang membuat Indonesia mendapatkan dampak positif dengan adanya hasil MCPS ke-II yang membuat Indonesia mendapatkan pinjaman separuh dari dana yang dikeluarkan oleh IDB.

Pinjaman lunak tanpa bunga dari program Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dari IDB menjadi solusi ketika tiga sektor utama menjadi tugas terbesar dalam rangka mencapai target pembangunan dalam RPJMN. Tiga sektor tersebut meliputi: proyek perbaikan kawasan kumuh, pengembangan empat universitas dan proyek transmisi listrik.